

**Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemenuhan Kebutuhan Listrik di Pulau Salibabu**

**Effendi Marune<sup>1</sup>**  
**Fanley Pangemanan<sup>2</sup>**  
**Jusuf Wowor<sup>3</sup>**

Email Korespondensi: [effendimarune@gmail.com](mailto:effendimarune@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu. Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Namun, kondisi kelistrikan di Pulau Salibabu masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kapasitas pembangkit yang terbatas, jam nyala listrik yang belum stabil, serta kendala geografis sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat di Pulau Salibabu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak PLN ULP Lirung, pemerintah kecamatan, dan masyarakat setempat. Analisis penelitian mengacu pada teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang meliputi peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah menjalankan perannya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik melalui koordinasi dengan PLN, penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur listrik, serta dukungan logistik seperti transportasi bahan bakar dan mesin pembangkit. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kapasitas pembangkit yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat, serta pengembangan sumber energi alternatif agar pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

***Kata Kunci: Pemerintah, Listrik, Salibabu, Talaud***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

## Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah yang secara geografis masuk dalam kategori wilayah perbatasan dan kepulauan. Kabupaten ini terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di Laut Sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi dan pusat jaringan interkoneksi listrik nasional menjadikan daerah ini menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan energi, khususnya listrik. Meskipun memiliki potensi energi lokal seperti tenaga surya dan mikrohidro, keterbatasan infrastruktur, anggaran, dan dukungan teknis menyebabkan banyak desa di Talaud belum mendapatkan akses listrik secara memadai.

Salah satu pulau yang menjadi cerminan dari permasalahan tersebut adalah Pulau Salibabu. Pulau ini merupakan bagian dari gugusan utama Kabupaten Kepulauan Talaud dan dihuni oleh ribuan penduduk yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian, serta aktivitas ekonomi kecil lainnya. Namun demikian, hingga kini, Pulau Salibabu masih mengalami keterbatasan pasokan listrik, baik dari sisi cakupan wilayah maupun jam operasional. Di banyak desa, listrik hanya menyala beberapa jam pada malam hari. Fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas tidak dapat beroperasi secara optimal akibat keterbatasan daya, dan pelaku usaha lokal kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena ketergantungan terhadap sumber daya listrik yang belum stabil.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terus menunjukkan perannya dalam menangani persoalan kelistrikan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya terkait proyek pembangunan PLTU di Tarun yang hingga saat ini masih mangkrak dan belum memberikan manfaat bagi warga. Kondisi tersebut memicu perhatian serius dari para pemangku kebijakan daerah. Menanggapi aspirasi masyarakat, anggota DPRD Devid Bee dari Komisi III mengambil langkah konkret dengan melakukan kunjungan langsung ke Dinas ESDM. Kunjungan ini bertujuan menyampaikan berbagai keluhan serta harapan warga mengenai kebutuhan listrik yang stabil dan merata di seluruh wilayah Talaud.

Tidak hanya sampai di situ, perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Engelbertus Tatibi, yang turun tangan secara langsung. Beliau menginisiasi pertemuan dengan Manager ULP PLN Tahuna, Adi Upaya, guna memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran. Dalam pertemuan tersebut, Tatibi menegaskan pentingnya percepatan solusi, termasuk upaya relokasi mesin pembangkit baru ke wilayah Salibabu dan Kabaruan yang selama ini mengalami gangguan pelayanan listrik. Aspirasi ini mendapat respons positif dari pihak PLN, dan terdapat harapan besar bahwa pengadaan serta relokasi mesin baru tersebut akan segera direalisasikan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD Talaud dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat serta

memastikan pemerataan layanan listrik demi kelancaran aktivitas dan peningkatan kesejahteraan warga Talaud.

Dengan latar belakang tersebut, menjadi sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas peran tersebut dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal yang ideal. Lebih jauh lagi, penelitian ini bertujuan untuk mendorong hadirnya kebijakan publik yang lebih inklusif, transformatif, dan berpihak kepada masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya.

### Penelitian Terdahulu

1. Rizka Diana (Universitas Brawijaya, 2014) yang berjudul "Implementasi Penyediaan Jaringan Listrik Pedesaan dalam Upaya Mengurangi Isolasi Daerah Terpencil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penyediaan jaringan listrik pedesaan dalam upaya mengurangi masalah isolasi daerah terpencil dan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pada Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa implementasi penyediaan jaringan listrik pedesaan belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan fasilitas jaringan listrik yang belum menciptakan keadilan secara merata untuk masyarakat. Konsentrasi pembangunan dilakukan masih pada wilayah perkotaan atau sentra pedesaan. Selain itu, masih banyaknya jumlah dusun yang masih gelap membuat Kabupaten Bojonegoro belum mencapai rasio elektrifikasi sempurna, hal itu terjadi karena masih banyak kendala dalam proses pembangunan penyediaan jaringan listrik pedesaan. Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah perlu meningkatkan energi alternatif seperti pengembangan dalam pembangunan instalasi jaringan listrik dengan PLTS yang menjadi energi baru terbarukan. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan untuk mempermudah proses pembangunan, sehingga Bagian SDA Kabupaten Bojonegoro perlu bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu juga perlu adanya kemudahan dalam perijinan pinjam kawasan kepada pihak terkait terutama Perhutani untuk penanganan Desa terpencil pada kawasan hutan. Tujuannya yaitu, agar tidak menghambat pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan isolasi daerah.
2. Denny Julius Mawuntu , Oskar Makasarat , Royke Aru Koraag , Altje Ester Poli , Harvard Kaunang Najoan ( 2025 ) yang berjudul Analisa Daya Mampu Pasokan Listrik Di Pulau Marampit Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menganalisis daya mampu pasokan listrik di Pulau Marampit, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia

dengan keterbatasan infrastruktur energi. pembangkit listrik yang tersedia, efisiensi distribusi, serta performa operasional pembangkit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas daya pembangkit sebesar 200 kW belum sepenuhnya memadai dalam memenuhi beban puncak sebesar 170 kW, dengan cadangan daya (reserve margin) hanya 17,65%, di bawah standar nasional sebesar 20%. Efisiensi konsumsi bahan bakar tercatat sebesar 0,38 liter/kWh, melampaui standar efisiensi nasional sebesar 0,3 liter/kWh, yang berdampak pada tingginya biaya operasional. Waktu layanan listrik rata-rata 14 jam per hari masih tergolong rendah, dengan frekuensi pemadaman mendadak mencapai 2–3 kali per minggu. Potensi pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dengan intensitas radiasi 4,8 kWh/m<sup>2</sup>/hari, dinilai tinggi dan dapat mendukung integrasi sistem hybrid PLTD–PLTS. Temuan ini menjadi dasar penting dalam pengembangan strategi energi yang andal dan berkelanjutan untuk wilayah perbatasan dan kepulauan kecil.

3. Madin Silalahi dan Darmanto Giawa (2021). Berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan menunjukkan bahwa apabila apabila ada masalah yang dihadapi masyarakat sebagai pengguna jasa listrik negara atau PLN bukan karena kesalahan masyarakat, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berusaha menolak dan/atau menyangkal serta tidak bereaksi dan juga tidak memenuhi

remunerasi atas perkara tersebut, maka pada saat itu PLN dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Perdebatan Pembeli atau pembeli dapat mengajukan kepada kuasa hukum di rumah pelanggan menurut ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal Pasal 19 ayat (1) "Pelaku bisnis bertanggung jawab untuk memberikan imbalan atas kerugian, pencemaran, dan kerugian pembeli karena memakan produk dan manfaat tambahan yang dikirim atau ditukar.

Dari ketiga penelitian diatas memiliki perbedaan penelitian yang akan di laksanakan peneliti yang pertama adalah meneliti peran strategis Pemerintah Kabupaten Talaud sebagai mitra aktif PLN dalam menjamin pasokan listrik di Pulau Salibabu, dengan tantangan geografis perbatasan maritim dan dampak langsung pada sektor perikanan. Perbedaan yang kedua adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana menelaah fungsi pemerintahan daerah dalam mengatasi tantangan layanan dasar di daerah perbatasan kepulauan. Dan perbedaan yang ketiga dimana penelitian peneliti bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dan aksesibilitas listrik oleh PLN di wilayah kepulauan...

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang akurat melalui observasi terhadap fenomena-fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan

mempertimbangkan data yang ada penelitian ini akan di lakukan di kecamatan lirung kab,kep.talau provinsi Sulawesi utara.

Adapun poin-poin yang akan dijadikan rujukan dalam hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Kebijakan Pemerintah: Mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah pusat dan daerah telah mendukung penyediaan listrik di wilayah Pulau Salibabu.
2. Dukungan Infrastruktur oleh Pemerintah: Mengevaluasi peran pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur listrik di daerah terpencil, serta dampaknya terhadap keandalan layanan listrik bagi masyarakat lokal.
3. Penggunaan Sumber Daya Energi Lokal: Menilai kebijakan pemerintah dalam mendorong pemanfaatan sumber daya energi lokal, seperti energi terbarukan, untuk mendukung keberlanjutan penyediaan listrik di Pulau Salibabu.
4. Kerjasama antara Pemerintah dan PLN: Mengidentifikasi model kerjasama yang optimal antara pemerintah dan PLN dalam aspek pembiayaan, teknis, dan manajerial, untuk meningkatkan pelayanan listrik di daerah tersebut.
5. Dampak Ekonomi dan Sosial: Menganalisis dampak penyediaan listrik yang lebih baik terhadap kondisi ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kualitas hidup masyarakat Pulau Salibabu

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

### **Pembahasan**

1. Peran pemerintah sebagai regulator  
Peran pemerintah sebagai regulator dalam konteks Kabupaten Kepulauan Talau merupakan aspek penting dalam memastikan pelayanan publik, termasuk penyediaan energi listrik, berjalan sesuai dengan asas keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam pandangan Ryaas Rasyid, fungsi regulator menempatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan aturan yang menjadi landasan hukum bagi semua pelaku pembangunan, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam kerangka teori Ryaas Rasyid, peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi mendasar yang menempatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pengatur, dan penjaga keteraturan dalam masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menetapkan aturan main yang adil, menyusun kebijakan publik, dan menciptakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aktivitas pembangunan, termasuk penyediaan layanan dasar seperti energi listrik.

Di Kabupaten Kepulauan Talaud, peran sebagai regulator telah mulai dijalankan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal konsistensi, implementasi, dan keberlanjutan. Pemerintah daerah telah menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kebutuhan listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Salibabu. Hal ini tercermin dalam sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra dinas teknis yang memuat program.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan perwujudan dari fungsi pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aktif mendorong terjadinya perubahan sosial dan pembangunan yang dinamis di tengah masyarakat. Dalam kerangka pemikiran Ryaas Rasyid, pemerintah sebagai dinamisator bertugas membangkitkan semangat kolektif, menggerakkan potensi lokal, serta memotivasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam pembangunan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu, peran ini menjadi sangat penting mengingat wilayah tersebut merupakan daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sejauh ini telah menunjukkan upaya menjalankan peran sebagai dinamisator, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Pemerintah berupaya menggerakkan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya akses listrik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa desa, ada upaya mengajak masyarakat untuk bergotong royong saat proyek

pemasangan jaringan listrik berlangsung. Ini menjadi bentuk awal dari keterlibatan masyarakat yang sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan listrik di pulau-pulau kecil.

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator  
Peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan berbagai pihak, baik masyarakat, swasta, maupun lembaga teknis, dapat berperan aktif dalam pembangunan. Dalam pandangan Ryaas Rasyid, fasilitator berarti pemerintah hadir untuk membuka jalan, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia, dan menjamin bahwa proses pembangunan berlangsung secara inklusif dan efektif. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu, peran fasilitator menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas geografis wilayah, terbatasnya kapasitas masyarakat, serta keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan energi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum telah menjalankan peran sebagai fasilitator, meskipun masih dalam taraf yang belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah kepulauan. Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PLN serta pemerintah pusat untuk memperjuangkan pembangunan jaringan listrik di desa-desa yang belum teraliri. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga menyediakan dukungan teknis berupa pembukaan akses jalan untuk pembangunan tiang listrik, pengadaan lahan, hingga membantu mengatasi hambatan

administratif yang menghambat percepatan proyek.

#### 4. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi katalisator yang mampu mempercepat proses elektrifikasi di wilayah-wilayah terpencil, termasuk Pulau Salibabu. Beberapa langkah yang sudah dilakukan menunjukkan adanya upaya untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti mengajukan proposal ke PLN, menjalin komunikasi dengan kementerian terkait, hingga mengakomodasi kunjungan kerja dan survei teknis ke daerah-daerah yang belum terjangkau listrik. Dalam hal ini, pemerintah berperan mendorong pihak luar agar memberikan perhatian terhadap kondisi daerah yang selama ini terpinggirkan dari aliran energi. Meskipun demikian peran sebagai katalisator belum berjalan secara maksimal. Banyak inisiatif yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, hanya muncul ketika ada tekanan dari masyarakat atau menjelang kegiatan politik tertentu. Setelah itu, tindak lanjut dari upaya yang telah dimulai sering kali mandek. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem koordinasi antarinstansi, belum adanya forum lintas sektor yang berjalan aktif, serta rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan energi di daerah. Pemerintah daerah belum mampu mendorong investasi atau kerja sama jangka panjang yang dapat mempercepat pemerataan listrik, terutama di wilayah yang secara ekonomi dianggap kurang menguntungkan..

## Penutup

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengambil peran dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan. Pemerintah daerah telah terlibat dalam mendukung PLN, baik melalui koordinasi kebijakan, penyediaan lahan, hingga bantuan logistik seperti transportasi bahan bakar.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kapasitas pembangkit yang terbatas, kondisi geografis yang sulit, serta kurangnya anggaran yang memadai. Peran pemerintah sebagai penggerak, pendukung, dan penyambung kepentingan masyarakat sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya maksimal.

Keterbatasan pasokan listrik menyebabkan dampak besar bagi aktivitas masyarakat, terutama sektor ekonomi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan listrik bisa dinikmati secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Pulau Salibabu..

### Saran

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu meningkatkan perhatiannya terhadap sektor kelistrikan, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan seperti Salibabu. Perencanaan dan kebijakan daerah sebaiknya mulai memasukkan program kelistrikan sebagai prioritas utama pembangunan. Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama yang lebih kuat dengan PLN dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih

cepat dan efektif, termasuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kelistrikan agar kebutuhan dan harapan warga dapat terakomodasi dengan baik.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaboratif, pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Salibabu dapat ditingkatkan demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat setempat.

### Daftar Pustaka

Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mappiare, A. (2009). *Teori dan Praktek Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Penerbit Unesa University Press.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Ryaas. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rasyid, Ryaas. (2003). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi*

*Etika dan Filosofi Kekuasaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Ridwan. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. (1995). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Undang undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelayanan Kewajiban Umum (Public Service Obligation/PSO) di Bidang Ketenagalistrikan oleh PT PLN (Persero).

Sumber lain

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka 2024*. Melonguane: BPS Kabupaten Kepulauan Talaud.

- Diana, Rizka. (2014). Implementasi Penyediaan Jaringan Listrik Pedesaan dalam Upaya Mengurangi Isolasi Daerah Terpencil. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Brawijaya, Malang.
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan – Kementerian ESDM. (2023). Statistik Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2023. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2021–2030. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Kementerian ESDM RI. (2021). Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2021–2030. Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Mawuntu, Denny Julius, Makasarat, Oskar, Koraag, Royke Aru, Poli, Altje Ester, & Najoan, Harvard Kaunang. (2025). Analisa Daya Mampu Pasokan Listrik di Pulau Marampit Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Teknik Elektro dan Energi Terbarukan*
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021–2026. Talaud: Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Lirung. (2024). Laporan Kinerja dan Distribusi Listrik Wilayah Kepulauan Talaud Tahun 2023–2024. Tahuna: PLN UP3 Tahuna.
- PLN ULP Lirung. (2023). Laporan Tahunan Layanan dan Capaian Kinerja Wilayah Kerja.
- PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo). (2022). Siaran Pers: Listrik Terangi Pulau Terluar di Perbatasan NKRI. Diakses melalui <https://www.pln.co.id>
- PT PLN (Persero). (2023). Laporan Kinerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Suluttenggo. [Dokumen Laporan Resmi PLN].
- Silalahi, Madin & Giawa, Darmanto. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara di Desa Hiliwosi Kecamatan Ulususua Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*
- UNDP Indonesia & Bappenas. (2021). *Renewable Energy for Remote Areas: Strategy and Implementation Report*. Jakarta: United Nations Development Programme.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Talaud. (2023). Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Angka 2023. Talaud: BPS